



# RENCANA KERJA

## TAHUN 2023



**Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan**

**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan**

**Jl. Pahlawan No. 1A, Tabanan-Bali, Telp. (0361)812623**

**2022**




## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Renja) Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2023 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja (Renja) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 02 Agustus 2022  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tabanan,  
  
**Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19660818199303 1 011



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ...	23
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	29
3.3 Program dan Kegiatan .....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB V PENUTUP .....	45



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah (Renja) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1). Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 2). Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023, 3). Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus



mengikuti tata cara dan alur penyusunannya. Penyusunan Renja PD Tahun 2023 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2023 merupakan Tahun Keenam arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD yang akan dituangkan kedalam RPJMD 2021-2026, renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan PD Tahun 2023. Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada dan Renja Perangkat Daerah dijadikan atau digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Renja



Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud apabila dalam pemerintahan telah terkandung beberapa unsur seperti transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Penerapan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan begitu konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terjaga.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025. Sebagai arah pembangunan Tahun Keempat ”,Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2023 masuk dalam misi yang kedua yaitu Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan yang kemudian disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun Renja Tahun 2023 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2023 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra PD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini merupakan dokumen



perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;





- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
- q. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dimaksudkan seperti yang dimandatkan Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping itu sebagai kerangka dan arah perwujudan *good and clean governance*. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup.



- b. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan OPD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun



lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan



5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukannya itu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditunjukkan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.



### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, paguindikatif, maupun kombinasike duanya.

### **Bab IV Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

### **Bab V Penutup**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain



itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup didukung oleh kegiatan dengan indicator Kinerja Utama Prosentase jumlah Kasus yang tertangani dengan target 100% (10 Kasus) dan realisasi 110% (11 Kasus)
2. Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah dengan indicator Kinerja Utama persentase desa yang mengelola sampah secara mandiri dengan target 20% dan realisasi 20 Ton atau sebesar 90%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLH didukung oleh kegiatan dengan indicator Kinerja Utama Nilai LKJIP dengan target A(85) dan realisasi A (85) atau sebesar 100%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup tertuang kedalam Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Capaian Sasaran

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2021</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)</b>
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase jumlah Kasus yang tertangani pencemaran	100% (10 Kasus)	110% (11 Kasus)	110%
2	Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah	Persentase desa yang mengelola sampah secara mandiri	20 %	25,5%	128%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Nilai LKJiP	A	A	100%





Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021  
Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program ( <i>outcomes</i> )/Kegi atan ( <i>output</i> )	Target Kinerj a Capai an Progr am (Renst ra Peran gkat Daera h) Tahu n 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Cat ata n An alis is
					Target Renja Tingkat Daerah tahun 2021	Realisa si Renja Perang kat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(8/7x 100%)	9	10	11=(10 /4)	12
2 5	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>										
2 5 1	<b>DLH</b>										
2 5 1 1	<b>DLH</b>										



2	5	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100,00	100%	20	2000,00%	120,00	-	-	
2	5	1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas fungsi PD	92%		86%	50	5813,95%	50,00	-	-	
2	5	1	1	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	100,00	100%	37,5	3750,00%	137,50	-	-	
2	5	1	1	15	Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kaskus lingkungan yang dapat ditangani	82	100,00	80	23,77	1,26%	101,01	-	-	



2	5	1	1	16	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	5 Jenis	100,00	5 Jenis	20	1,55%	107,53	-	-	
2	5	1	1	17	Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Jumlah spot/titik taman/hutan yang terpelihara/dikembangkan	12 taman, 5 hutan	100,00	12 taman 5 hutan	10		110,00	-	-	
2	5	1	1	18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah/Rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada	90%	100,00	50%	19,44	3888,00%	119,44	-	-	
2	5	1	1	19	Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Jumlah pengelolaan persampahan berbasis masyarakat yang didirikan, dibangun dan dipantau	2 TPST, 5 Bank Sampah	100,00	2 TPST, 5 Bank Sampah	18,33		118,33	-	-	



2	5	1	1	20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT	Kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/th	1480,5 m3/th	100,00	1283,1 m3/th	20		120.00	-	-	
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100%	-	-	-	-	50%	50%	50%	Jumlah Administrasi Perkantoran yg Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD dibagi Total Kegiatan yang mendukung kelancaran Administrasi dikali 100



2	11	03		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota	Persentase Desa Proklamasi	12%	-	-	-	-	9.70%	3%	25 %	Jumlah Desa yg ditetapkan menjadi Desa Proklamasi dibagi Jumlah seluruh Desa di Kab. Tabanan dikali 100
2	11	04		Program Pengelolaan Keagamaan Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan RTH	100%	-	-	-	-	50%	50%	50 %	Jumlah tanam yg terpelihara dibagi jumlah taman yang ada dikali 100
2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60%	-	-	-	-	50%	50%	83.33 %	timbulan sampah yg terkelola didaerah layanan dibagi volume timbulan sampah dikali 100



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang mana di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Nomor 69/DLH/2017 Tentang Standar Pelayanan Dinas Lingkungan. Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan dijabarkan sesuai dengan tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabanan  
Kabupaten Tabanan

Dinas Lingkungan Hidup

NO	Indikator	Standar PelayananDLH	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Peresentase Kasus yang tertangani	Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan	10	10	10	10	18	11	10	10	
2	SKKLH, Rekomendasi Dokumen Lingkungan dan Registrasi SPPL	Pelayanan Penerbitan Ijin Lingkungan	65	70	75	80	108	99	5	5	
3	Rekomendasi PPLH	Pelayanan Penerbitan Ijin Pem,anfaatan Air Limbah ke Tanah dan/Atau izin Air Limbah ke Sumber Air.	5	5	5	5	8	-	5	5	
4	Rekomendasi Penerbitan ijin sementara Limbah b3	Pelayanan Penerbitan Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	10	10	10	10	13	2	-	-	



5	Jumlah /rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada	Pengaduan Pelayanan Pengangkutan Sampah, RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan, Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Persampahan/Kebersihan	90	90	90	90	90	80.94	-	-	
	Jumlah KK yang Terlayani	- Penyedotan Kakus	750 KK	750 KK	750 KK	750 KK	691 KK	490 KK	750 KK	750 KK	
	Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang Terpelihara	- RTH (Ruang Terbuka Hijau)	100%	100%	100%	100%	95%	97%	100%	100%	
	Persentase Pemakaian Kekayaan Daerah	- Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	100%	87%	50%	100%	100%	
	Jumlah Desa yang Terlayani	- Pengangkutan	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	
	Jumlah Lokasi yang Terlayani	- Penyapuan	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	
	Jumlah Kecamatan yang Terlayani	- Pemangkasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	
	Jumlah Taman yang Terpelihara	- Pemeliharaan taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	





Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah menyusun dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, dan PK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Adapun isu-isu strategis tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH.
- b. Memberdayakan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
- c. Menciptakan masyarakat yang taat Hukum Lingkungan demi Kelestarian lingkungan.
- d. Mewujudkan Pengelolaan sumber daya alam secara selaras, serasi dan seimbang
- e. Belum tersedianya sistem pengolahan sampah yang baik
- f. Perilaku masyarakat yang belum menunjang kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan
- g. Pengelolaan limbah yang belum optimal
- h. Sarana Prasarana yang belum memadai
- i. Belum optimalnya SDM yang dimiliki

### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Keberhasilan pembangunan Kepala Daerah yang tidak terlepas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja tahun 2023 pengiputan usulan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah



Daerah yang akan di fokuskan untuk memastikan bahwa pendekatan perencanaan politik, teknokratik, *top down dan bottom up*, dapat berjalan dengan adil (*fair*).

Secara umum Permasalahan dan isu strategis Bidang Lingkungan Hidup tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tabanan antara lain :

1. pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi
2. tingginya timbulan sampah dan limbah

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tabanan Tahun 2021

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaraan/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kabupaten Tabanan</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tabanan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	



	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabanan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	
2	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Tersusunnya Dokumen IKLH dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</b>	<b>2 Dokumen</b>	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Tersusunnya Dokumen Lingkungan	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Tersusunnya Dokumen KLHS	1 Dokumen	
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani</b>	<b>11 kasus</b>	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Dokumen Penetapan Kelas Air dan Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Dokumen Kualitas Air	1 Dokumen	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Dokumen Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Jumlah Spot/Titik Taman/Hutan Yang Terpelihara/Dikembangkan</b>	<b>17 Taman Hayati</b>	



	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Luas Taman Kota Yang Ditata Dengan Baik dan Indah	2,535 Ha	
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani</b>	<b>11 Kasus</b>	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Tabanan	Data Dokumen	1 Dokumen	
6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Jumlah Usaha Yang Dibina dan Diawasi</b>	<b>99 Usaha</b>	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Data Usaha	99 Usaha	
7	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diperoleh</b>	-	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang di peroleh	-	



8	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani</b>	<b>11 kasus</b>	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Persentase Kasus Yang Tertangani	11 kasus	
9	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Kabupaten Tabanan	<b>Rasio/persentase Volume Sampah Yang mampu diangkut/ diolah Terhadap Volume Sampah Yang Ada</b>	<b>80.94%</b>	
	Pengelolaan Sampah	Kabupaten Tabanan	Produksi Pupuk Organik	19.785 Ton	



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJPD 2021 – 2025, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2021; dan
2. Meningkatnya *role model* sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dimana DLH Kabupaten Tabanan mendukung Tujuan pertama yaitu Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman), maka Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja.

Dalam kaitan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut, khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, rencana pelaksanaannya dituangkan dalam



program lintas bidang dalam RPJMN 2020-2024 dengan target indeks kualitas lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu.

Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, dimana hal tersebut juga merupakan salah menjadi salah satu strategi umum daerah serta ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja daerah yaitu melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator harus Spesific, Measurable Achievable dan Relevant. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN”.



Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi isu-isu strategis terkait Lingkungan Hidup yang menjadi prioritas dalam penanganan isu lingkungan di Kabupaten Tabanan adalah menyangkut pengelolaan sampah. Sampah menjadi permasalahan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang terpolo, membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas, serta komitmen berkelanjutan. Penanganan sampah sampai saat ini masih dominan pada pola: kumpul, angkut, dan buang. Pola ini akan menimbulkan permasalahan yang semakin membesar sejalan dengan perjalanan waktu (bom waktu). Melalui pola ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu melayani 8 desa di 2 kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kediri). Dari cakupan pelayanan di wilayah tersebut, tahun 2020 penanganan sampah hanya mencapai 44,92 persen. Secara bertahap pola kumpul-angkut-buang, akan diganti dengan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan. Setiap desa diharapkan memiliki manajemen pengelolaan sampah sehingga sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya sampah residu yang tidak dapat ditangani ditingkat desa.

Sasaran yang ditetapkan pada RKPD Kabupaten Tabanan, Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan Visi dan Misi mendukung sasaran terkait Lingkungan Hidup yaitu:

1. Terwujudnya Pembangunan yang Berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
2. Meningkatnya perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.





Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2023 diantaranya Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah, Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH. Pencapaian sasaran tersebut terlaksana melalui Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi DLH sebagai Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa DLH mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Sampah



## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Disasaran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Lingkungan Hidup mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail Rencana kerja dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2023 disampaikan pada Tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tabanan  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>31.889.551.700</b>			<b>28.352.398.733</b>					
2	11	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>15.931.352.600</b>			<b>16.737.622.637</b>					
2	11	01	2.1		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>5.000.000</b>			<b>10.000.000</b>					
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedia nya Dokumen SAKIP	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	5.000.000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia nya Dokumen SAKIP	Kab. Tabanan , Tabanan , Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Dokumen	2.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	5.000.000



2	11	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>13.205.242.000</b>				<b>14.262.000.000</b>		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	139 Orang/bulan	100 %	13.202.242.000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	14.250.000.000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	3.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	12.000.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>100.000.000</b>				<b>9.500.000</b>		
2	11	01	2.04	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	400 Orang	100 %	100.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	9.500.000



2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							141.533.400			171.441.140			
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1.898.000	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	2.087.800
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1.949.800	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	2.144.780
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	67.056.400	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	73.762.040
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	29.962.200	PEN DAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	32.958.420



2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	20.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	37.754.400
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	20.667.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	22.733.700
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>100.000.000</b>				<b>217.536.550</b>		
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	36 Unit	100 %	100.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	217.536.550



2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.422.466.400			1.564.103.040			
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3.900.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	3.900.000
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	100.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	110.000.000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	1.318.366.400	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	1.450.203.040
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>957.310.800</b>			<b>503.041.907</b>			
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Terpeliharaannya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	222.080.800	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	244.288.907





2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	500.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	0
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	51 Unit	100 %	35.230.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	38.753.000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	200.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	220.000.000



2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						730.000.000				315.810.000		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						601.300.000				221.430.000		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Desa Proklamasi	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	2 Dokumen	14.96%	412.800.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Persentase Desa Proklamasi	12 %	179.080.000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Desa Proklamasi	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	14.96%	61.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Persentase Desa Proklamasi	12 %	12.100.000



2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Proklam	Jumlah pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	14.96%	127.500.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	30.250.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>							<b>74.800.000</b>					<b>82.280.000</b>	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Desa Proklam	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	1 Laporan	5.26 %	16.500.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	18.150.000
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklam	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang Dihentikan	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Titik	5.26 %	58.300.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	64.130.000



<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>							<b>53.900.000</b>					<b>12.100.000</b>	
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	5.26 %	53.900.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		Persentase Desa Proklam	12 %	12.100.000
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>							<b>1.949.275.250</b>					<b>1.056.842.500</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>							<b>1.949.275.250</b>					<b>1.056.842.500</b>	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ketersediaan RTH	Jumlah RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Yang Terpelihara	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25.35 Ha	12 Taman	1.838.250.250	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase ketersediaan RTH	100 %	1.056.842.500
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Persentase ketersediaan RTH	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Taman Yang Terpelihara	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0%	12 Taman	111.025.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase ketersediaan RTH	100 %	0



2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>							<b>13.278.923.850</b>					<b>10.242.123.596</b>		
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>							<b>13.278.923.850</b>					<b>10.242.123.596</b>		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	Jumlah Timbunan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	22 Ton	18 Ton	7.453.425.150	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	60 %	6.795.446.950
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Timbunan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	2 Kelompok	18 Ton	374.000.000	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PA D)		Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	Persentase Timbunan Sampah yang terkelola	60 %	189.301.646



2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	1 Dokumen	18 Ton	5.451.498.700	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)		Persentase Timbulan Sampah yang dikelola	60 %	3.257.375.000		
<b>TOTAL</b>																<b>31.889.551.700</b>				<b>28.352.398.733</b>



## BAB V

### PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Dalam Renja tersebut diuraikan target Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2023 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Lingkungan Hidup mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tabanan,

